



LeIP

Rekrutmen Calon Hakim: Problem Distribusi & Kebutuhan Riil Pengadilan

**Astriyani, SH., MPPM.
Direktur Eksekutif**

Agenda Presentasi

Sub-Judul Slide



L e I P

**Urgensi
Rekrutmen
Hakim**

**Perencanaan
dalam Proses
Manajemen
SDM Hakim**

**Problem
Distribusi
Hakim**

**Menghitung
Kebutuhan
Riil Jumlah
Hakim**

Rekomendasi

Beberapa Studi LeIP

Sub-Judul Slide



L e I P

1. Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Peradilan (2003)
2. Penyusunan Naskah Akademis & Peraturan MA tentang Rekrutmen, Promosi dan Mutasi Hakim (2006)
3. Penghitungan Beban Kerja, Kinerja & Kebutuhan Personil Hakim (2010)



L e I P

1. Urgensi Rekrutmen Calon Hakim

Penyebab: Ketidakjelasan Kerangka Hukum Manajemen SDM Hakim



- ✓ Sudah hampir 7 tahun tidak dilakukan seleksi calon hakim.
- ✓ Mandegnya proses seleksi terutama disebabkan tidak adanya kesepakatan antara MA, KY dan Pemerintah soal kewenangan untuk menentukan jumlah calon hakim yang akan direkrut, serta gamangnya soal status Calon Hakim pada saat setelah diangkat sebagai Hakim.

Penyebabnya:

UU Aparatur Sipil Negara No. 5/2014 menyebutkan jabatan hakim sebagai salah satu jabatan Pejabat Negara (pengaturan serupa sebenarnya juga telah ada sejak tahun 1999 dalam UU Kepegawaian 43/1999).

Sehingga muncul pertanyaan: status apa yang akan disandang Calon Hakim setelah diangkat sebagai Hakim, tetap PNS/ASN (seperti yang dikehendaki UU ASN) atau langsung pejabat negara (namun belum ada peraturan teknisnya)?

Akibat



- ✓ Kekurangan jumlah hakim di **BEBERAPA** pengadilan-pengadilan tingkat pertama
- ✓ Potensi masalah dalam pengisian jabatan Pimpinan Pengadilan (regenerasi) dalam waktu 5-10 tahun ke depan

Pertanyaan:

Berapa tepatnya jumlah hakim yang dibutuhkan untuk **seleksi di masa transisi** ini (sambil menunggu status jabatan hakim yang lebih jelas dalam RUU Jabatan Hakim)?

Bagaimana menghitungnya? Berdasarkan **beban perkara**, atau hanya sebatas **kebutuhan regenerasi**, atau **keduanya**?

Beberapa Fakta



Analisis Laporan Tahunan MA:

Sejak tahun 2011 hingga 2015, terjadi penurunan jumlah Hakim sekitar 400 orang

Laporan Tahunan MA 2016:

Ada masalah validitas data, karena disebutkan jumlah Hakim “tiba-tiba” menjadi 8.000 orang kembali.

Beban kerja riil hakim di setiap pengadilan?

Menurut beberapa sumber, sudah dilakukan. Namun BELUM PERNAH DIPUBLIKASIKAN.

2.

Perencanaan dalam Proses Manajemen SDM Hakim

Fungsi Manajemen SDM oleh MA: Masih perlu Dibenahi



- ✓ Perencanaan dalam proses manajemen SDM adalah fungsi strategis yang hingga saat ini belum efektif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- ✓ Padahal, fungsi perencanaan ini adalah fungsi **KUNCI** dan **KRITIKAL** yang menentukan keberhasilan manajemen SDM di setiap organisasi

Dalam konteks rekrutmen, ada beberapa pertanyaan yang SEHARUSNYA dapat dijawab oleh MA dengan jelas, JIKA perencanaan dalam manajemen SDM di MA sudah terlaksana dengan efektif.

1. Berapa standar kinerja Hakim dalam menyelesaikan perkara?
2. Berapa jumlah Hakim yang pensiun setiap tahun?
3. Berapa jumlah Hakim yang dibutuhkan setiap pengadilan?
4. Berapa jumlah Hakim yang perlu disiapkan untuk dipromosikan sebagai Pimpinan dalam lima tahun ke depan?



L e I P

3. Problem Distribusi Hakim

Beberapa Data & Fakta (1)



Terlepas dari adanya kevakuman dalam rekrutmen Hakim pengadilan tingkat pertama, ada **ketidakmerataan distribusi Hakim dengan *gap* cukup tinggi antar pengadilan.**

- ✓ Kertas Kerja Manajemen SDM Hakim 2003
- ✓ Temuan kajian LeIP tahun 2010 tentang beban kerja dan distribusi Hakim di lingkungan peradilan umum tahun 2010

Beberapa Data & Fakta (2)

a. Lima Pengadilan Negeri dengan Rata-Rata Beban Kerja Hakim per Tahun Terbesar

No.	PENGADILAN NEGERI	KLAS PENGADILAN	RATA-RATA BEBAN KERJA HAKIM (Perkara)
1.	JAKARTA BARAT	IA KHUSUS	984.40
2.	JAKARTA SELATAN	IA KHUSUS	896.91
3.	SURABAYA	IA KHUSUS	870.10
4.	TANGERANG	IA KHUSUS	712.68
5.	BANYUWANGI	IB	625.89

Temuan kajian LeIP tahun 2010 tentang beban kerja dan distribusi Hakim di lingkungan peradilan umum tahun 2010

Beberapa Data & Fakta (3)

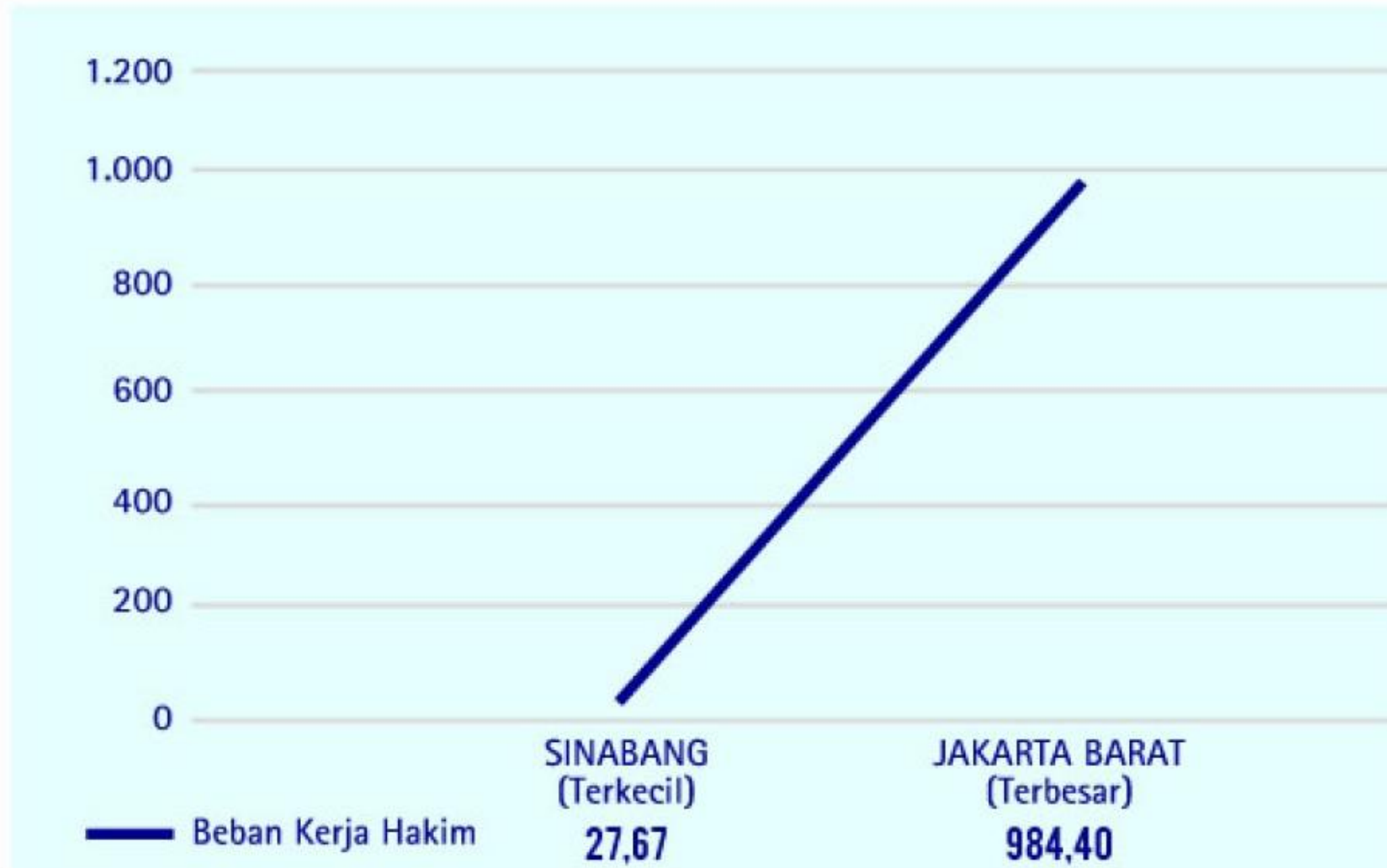
b. Lima Pengadilan Negeri dengan Rata-Rata Beban Kerja Hakim per Tahun Terkecil

No.	PENGADILAN NEGERI	KLAS PENGADILAN	RATA-RATA BEBAN KERJA HAKIM (Perkara)
1.	SINABANG	II	27.67
2.	LEMBATA	II	30.25
3.	SAWAH LUNTO	II	31.70
4.	LUBUK SIKAPING	II	32.91
5.	MALINAU	II	42.50

Temuan kajian LeIP tahun 2010 tentang beban kerja dan distribusi Hakim di lingkungan peradilan umum tahun 2010

Beberapa Data & Fakta (4)

SELISIH BEBAN KERJA HAKIM TERBESAR DENGAN TERKECIL



Temuan kajian LeIP tahun 2010 tentang beban kerja dan distribusi Hakim di lingkungan peradilan umum tahun 2010

4 .

Menghitung Kebutuhan Hakim setiap Pengadilan

Metode yang Digunakan

Sub Judul



LeIP

Mahkamah Agung

- Menggunakan panduan Buku I Pola Pembinaan Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Tata Usaha Negara
- Di mana disebutkan jumlah minimum Hakim yang harus disediakan berdasarkan **KELAS PENGADILAN**, bukan berdasarkan **BEBAN KERJA/JUMLAH PERKARA**

Organisasi Modern

- Penentuan jumlah kebutuhan SDM dalam organisasi modern yang lazim digunakan adalah menggunakan indeks *full time equivalent (FTE)*
- Metode ini digunakan oleh sebagian besar peradilan di negara lain (di antaranya Belanda dan sebagian besar pengadilan di negara bagian US)

MA kabarnya sudah mengkaji dan menyusun formula FTE dibantu program SUSTAIN-UNDP.

NAMUN BELUM DITERAPKAN.

Estimasi Ketersediaan Jumlah Hakim Tingkat Pertama 2010



a. Jumlah Hakim yang dibutuhkan dengan standar kinerja nilai rata-rata kinerja:

Standar Kinerja	163.72 perkara/hakim/tahun
Jumlah Hakim yang dibutuhkan	950
Jumlah Hakim yang tersedia saat ini	1563
Kelebihan Jumlah Hakim	613
Rasio jumlah Hakim saat ini dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan	1.65 kali lebih besar

b. Jumlah Hakim yang dibutuhkan dengan standar kinerja nilai Quartil 2

Standar kinerja	248 perkara/hakim/tahun
Jumlah Hakim yang dibutuhkan	733
Jumlah Hakim yang tersedia saat ini	1563
Kelebihan Jumlah Hakim	830
Rasio jumlah Hakim saat ini dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan	2.13 kali lebih besar

Apakah saat ini sudah proporsional?

Berapa banyak **SEBENARNYA** jumlah Hakim yang dibutuhkan?



L e I P

5. REKOMENDASI

REKOMENDASI (1)

Sub Judul



Mahkamah Agung

1. Menghitung dengan cermat jumlah hakim yang dibutuhkan setiap pengadilan tingkat pertama menggunakan formula FTE yang lebih mampu merefleksikan kebutuhan riil pengadilan.
2. Meninjau ulang proporsionalitas jumlah hakim dan beban kerja di setiap pengadilan.
3. Melakukan redistribusi sesuai kebutuhan.
4. Merumuskan proses seleksi, diklat Calon Hakim dan manajemen kinerja berbasis kompetensi.
5. Merumuskan proses seleksi Calon Hakim yang transparan, partisipatif dan akuntabel, termasuk dengan menerima masukan dari lembaga negara terkait: misalnya, KY dan Ombudsman

REKOMENDASI (2)

Sub Judul



Pemerintah, Komisi Yudisial & Lembaga Negara Lainnya

1. Mengkritisi pengajuan jumlah formasi Calon Hakim yang diusulkan MA agar lebih sesuai kebutuhan riil.
2. Mengkritisi objektivitas, transparansi dan akuntabilitas proses seleksi yang dilaksanakan Mahkamah Agung



Terima Kasih!



081319362063



astriyani@leip.or.id